

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara yang mempunyai 34 provinsi, dimana negara keempat di dunia dengan jumlah penduduk paling banyak. Jumlah penduduk banyak tentu saja mempunyai dampak terhadap perekonomian, termasuk terhadap ketenagakerjaan, dengan banyaknya penduduk suatu negara tetapi tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya yang menunjang akan menyebabkan permasalahan seperti contohnya pengangguran. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih mengalami proses pembangunan ekonomi yang memiliki tujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat. Dalam mencapai suatu kesejahteraan salah satunya dibutuhkan kesempatan kerja yang mendukung dan adanya pemerataan pendapatan di masyarakat, di Indonesia antara kesempatan kerja yang ada dengan angkatan kerja terjadi kesenjangan yaitu peningkatan jumlah kesempatan kerja tidak sebanding dengan peningkatan angkatan kerja yang meningkat lebih cepat, hal ini akan berdampak pada terciptanya pengangguran. Pengangguran yang terjadi akan memiliki dampak terhadap kehidupan sosial yaitu tingkat kriminal dan kekerasan, hal ini akan berpengaruh pada stabilitas dan pembangunan ekonomi akan terhambat serta kesejahteraan akan berkurang.

Di negara Indonesia, tidak ada larangan bagi setiap orang untuk bekerja, hal tersebut dijelaskan pada pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat tersebut memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk

mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut maka pemerintah lewat instansi terkait telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah-masalah, baik yang berhubungan dengan angkatan kerja maupun tenaga kerja. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah antara lain dengan meningkatkan mutu/kualitas tenaga kerja dengan melalui pendidikan formal dan non formal, menyelenggarakan pelatihan manajemen di daerah, meningkatkan prasarana pelatihan untuk pencari kerja dan pegawai pengawas ketenagakerjaan, memperluas kesempatan kerja dengan meningkatkan investasi, mendirikan pabrik atau industri yang bersifat padat karya, menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha dan menjalin kerjasama di bidang ketenagakerjaan dengan negara-negara lain.

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 - 64 ) tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi dan yang lain sebagainya.

Menurut Nanga (2005:249) mendefinisikan “pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak memiliki pekerjaan”.

Selain menjadi beban dan penghambat dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, pengangguran juga digunakan menjadi salah satu indikator dari pasar kerja yang ada. Rendahnya pengangguran sering dianggap menjadi suatu prestasi bagi suatu negara.

Secara umum upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran yang terjadi di negeri ini cukup berhasil, khususnya dalam menyediakan lapangan kerja. Peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia disebut bisa berpotensi menjadi bom waktu di tengah ancaman resesi ekonomi dunia. Dengan populasi terbesar keempat di dunia jumlah penduduk usia produktif tinggi dan pengangguran yang tinggi, bisa menjadi penghambat pemanfaatan bonus demografi. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan oleh suatu negara yang bersangkutan. Namun seiring berjalannya waktu ada beberapa provinsi di Indonesia yang mengalami penurunan pada tingkat pengangguran dan ada juga sebagian provinsi yang mengalami kenaikan pada tingkat pengangguran.

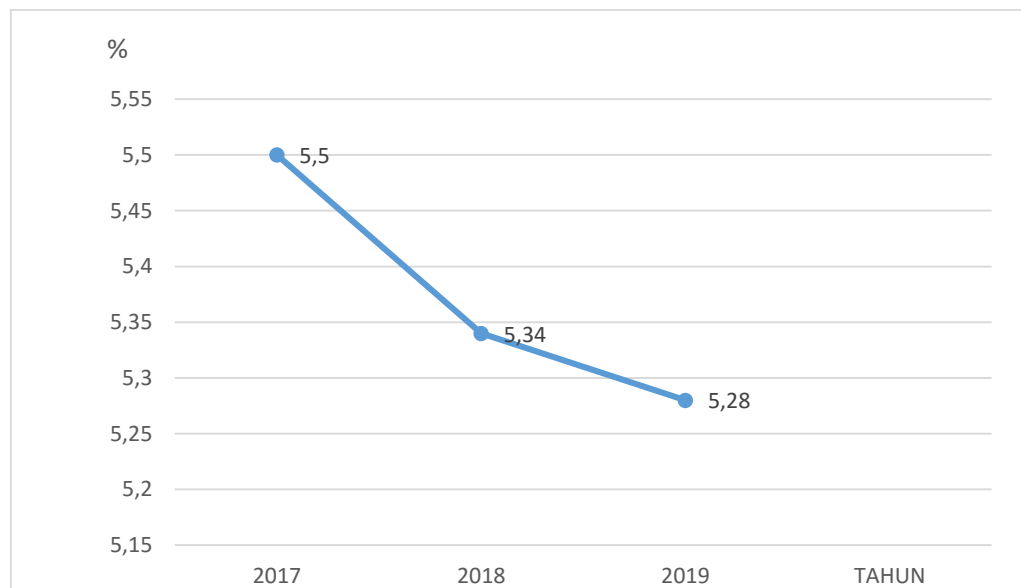
PROVINSI	2017	2018	2019
ACEH	6,57	6,36	6,2
SUMATERA UTARA	5,6	5,56	5,41
SUMATERA BARAT	5,58	5,55	5,33
RIAU	6,22	6,2	5,97
JAMBI	3,87	3,86	4,19
SUMATERA SELATAN	4,39	4,23	4,48
BENGKULU	3,74	3,51	3,39
LAMPUNG	4,33	4,06	4,03
KEP. BANGKA BELITUNG	3,78	3,65	3,62
KEP. RIAU	7,16	7,12	6,91
DKI JAKARTA	7,14	6,24	6,22
JAWA BARAT	8,22	8,17	7,99
JAWA TENGAH	4,57	4,51	4,49
DI YOGYAKARTA	3,02	3,35	3,14
JAWA TIMUR	4	3,99	3,92
BANTEN	9,28	8,52	8,11
BALI	1,48	1,37	1,52

**Gambar 1.1**  
**Tingkat Pengangguran tiap Provinsi di Indonesia (%) Tahun 2017-2019**

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)*

Secara umum dilihat pada Gambar 1.1 setiap provinsi dari tahun ke tahun berhasil mengalami penurunan. Namun ada provinsi di Indonesia yang menempati urutan paling tinggi dengan jumlah tingkat pengangguran sebesar 9,29% yaitu Provinsi Maluku, Provinsi Banten dengan jumlah 9,28% dan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 8,22%. sementara itu provinsi Bali mempunyai jumlah tingkat pengangguran terendah dengan jumlah 1,37% selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2019. Dengan kata lain tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2016 sampai 2019 adanya variasi dan ketimpangan antara provinsi yang satu dengan provinsi lainnya yang disebabkan oleh banyaknya penduduk di suatu provinsi, ketersediaannya lapangan pekerjaan dan potensi provinsi itu sendiri.

Jika dilihat keseluruhan maka jumlah pengangguran yang ada di Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Fenomena tersebut dapat dilihat pada data pengangguran di Indonesia tahun 2016-2019.



**Gambar 1.2**  
**Tingkat Pengangguran di Indonesia (%) Tahun 2017-2019**

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)*

Dilihat pada Gambar 1.2 jumlah tingkat pengangguran mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tahun 2017 dengan jumlah 5,50% terus mengalami penurunan sampai tahun 2019 dengan jumlah sebesar 5,28% yang menunjukkan adanya perubahan tingkat pengangguran di Indonesia.

Penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan faktor yang sangat penting. Perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatan modal dalam negeri dengan cara rehabilitasi pembaharuan, perluasan, pembangunan dalam bidang produksi barang dan jasa. Perlu diciptakan iklim yang baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan yang mendorong investor dalam negeri

untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Penanaman modal dalam negeri merupakan suatu bidang usaha yang ada di Indonesia, namun ada bidang-bidang yang perlu dipelopori oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah, seperti contohnya yang berkaitan dengan rahasia dan pertahanan negara. Penanaman modal dalam negeri di luar bidang-bidang tersebut dapat diselenggarakan oleh swasta nasional, seperti contohnya dibidang perikanan, perkebunan, pertanian, telekomunikasi, jasa umum, dan perdagangan umum. Penanaman Modal dalam Negeri merupakan sinergi bisnis antara modal negara dan modal swasta nasional.

Menurut Undang-Undang Tentang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 pasal 1 menyebutkan definisi modal dalam negeri adalah “modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum”. Penanaman Modal dalam Negeri menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2007 adalah “kegiatan untuk menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan menggunakan modal dalam negeri”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penanaman modal dalam negeri yaitu suatu kegiatan penanaman modal yang dilakukan penanam modal dengan menggunakan modal dalam negeri di wilayah negara Indonesia. Dengan adanya penanaman modal dalam negeri ini membuka peluang terhadap perluasan kesempatan kerja, dimana nantinya akan berdampak terhadap pengangguran yang ada di Indonesia.

Selain Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing juga diperlukan untuk memajukan perekonomian di Indonesia khususnya untuk mengatasi masalah

pengangguran, dengan banyaknya modal yang ada tentu saja akan di realisasikan dengan berbagai proyek sehingga akan menghasilkan lapangan kerja baru, yang nantinya bisa menyerap jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Penanaman Modal Asing lebih banyak mempunyai kelebihan, di antaranya bersifat jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, dan membuka lapangan kerja baru, dimana lapangan kerja ini sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 dalam pasal 1 Ayat 9 Tentang Penanaman Modal, “Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri”.

Menurut Irawan dan Suparmoko (2002 : 141) Penanaman Modal Asing merupakan investasi yang dilaksanakan oleh pemilik-pemilik modal asing di dalam negeri kita atau mendapat suatu keuntungan dari usaha yang dilaksanakan itu. Masuknya modal asing pada suatu negara mengakibatkan perluasan lapangan kerja, alih teknologi, pengembangan teknologi, subsidi impor untuk menghemat devisa, mendorong berkembangnya industri barang-barang ekspor non migas untuk mendatangkan devisa, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat membangun daerah tertinggal.

**Tabel 1.1**  
**Penanaman Modal di Indonesia Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>PMDN (Milyar Rupiah)</b>	<b>Pertumbuhan PMDN (%)</b>	<b>PMA (Juta US\$)</b>	<b>Pertumbuhan PMA (%)</b>
2017	262.350,5	0,21%	32.239,8	0,11%
2018	328.604,9	0,25%	29.307,9	-0,09%
2019	386.498,4	0,17%	28.208,8	-0,03%

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)*

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2017 dengan jumlah sebesar 262.350,5 Milyar Rupiah dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 386.498,4 Milyar Rupiah. Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan. Tahun 2017 dengan jumlah sebanyak 32.239,8 Juta US\$ dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 29.307,9 Juta US\$. Tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 28.208,8 Juta US\$. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya perang dagang antara Amerika Serikat dengan China.

Jika dilihat pada tanggal 27 Januari 2021 jumlah 1 US\$ adalah sama dengan Rp 14,090.00. Perbandingan nilai penanaman modal asing jika di ubah ke rupiah maka pada tahun 2017 merupakan tahun dengan angka paling besar yaitu dari 32.239,8 US\$ menjadi 453.877,20 Milyar Rupiah. Pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan dengan jumlah pada tahun 2018 sebesar 29.307,9 US\$ menjadi 412.599,00 Milyar Rupiah, tahun 2019 sebesar 28.208,8 US\$ menjadi sebesar 397.126,71 Milyar Rupiah.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara ditandai dengan menurunnya jumlah pengangguran, dan semakin meningkatnya jumlah sumber daya manusia yang berpendidikan di negara tersebut. Tingginya pendidikan seseorang akan semakin tinggi tingkat produktifitas yang akan dihasilkan, dalam bekerja akan lebih profesional, lebih



efektif dan efisien, produk yang dihasilkan lebih berkualitas dan diharapkan memberikan dampak positif dan dapat mengurangi pengangguran. Pengangguran yang disebabkan oleh SDM yang berpendidikan akan memberikan masalah yang besar karena kriminalitas yang tinggi. Bila hal ini tidak dapat diatasi, maka masyarakat ini juga menambah jumlah pengangguran di Negara tersebut (Sari, 2011).

Salah satu alat untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Dimana pendidikan mempunyai peran penting dalam pembentukan karakter, menambah pengetahuan dan *skill*, menciptakan serta mengembangkan kemandirian sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan dunia kerja. Pendidikan baik formal maupun non formal merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga harapannya bahwa sumber daya manusia memiliki kemampuan yang lebih dan dapat berkompetisi baik daerah, provinsi, maupun negara. Karena itu persiapan sumber daya manusia (SDM) yang mampu bersaing secara global atau mampu menciptakan lapangan pekerjaan dinilai sebagai persyaratan utama.

Berikut data rata rata lama sekolah (RLS) yang merupakan indikator dari pendidikan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diambil dari keseluruhan tiap tahun berdasarkan semua provinsi yang ada di Indonesia.

**Tabel 1.2**  
**Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2017 – 2019**

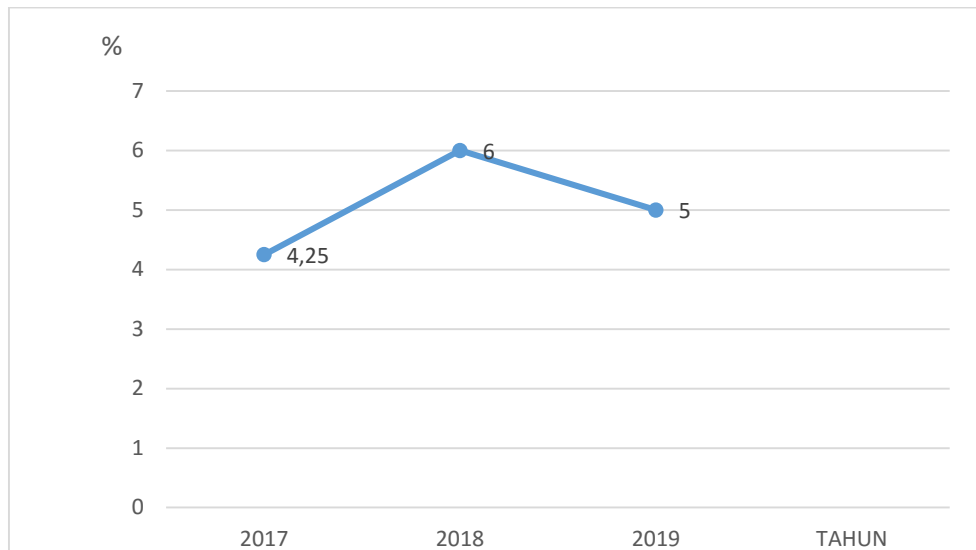
<b>Tahun</b>	<b>Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)</b>	<b>Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah (%)</b>
2017	8,50	0,01%
2018	8,58	0,01%
2019	8,75	0,02%

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)*

Dilihat pada Tabel 1.2 menjelaskan bahwa rata-rata lama pendidikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2017 rata-rata lama pendidikan mencapai 8,50 dan pada tahun 2019 mencapai 8,75. Jadi rata-rata lama pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahunnya terus berkembang dengan baik. Perkembangan banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya.

Suku bunga adalah salah satu indikator makro ekonomi yang perlu diperhatikan oleh investor, karena mempunyai kesanggupan untuk menerangkan sebab-sebabnya perubahan tingkat investasi. Kegiatan investasi hanya akan dilaksanakan apabila tingkat pengembalian modal lebih besar atau sama dengan suku bunga (Sadono Sukirno, 2004:122-125).

Menurut Bank Indonesia *BI rate* adalah suku bunga kebijakan moneter yang ditetapkan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Di negara-negara maju maupun berkembang seperti Indonesia. Perubahan penetapan suku bunga acuan atau *BI rate* merupakan salah satu penentu tingkat pertumbuhan ekonomi saat ini. Berikut data *Bi rate* tahun 2017-2019:



**Gambar 1.3**  
**BI rate (%) Tahun 2017-2019**

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)*

Dilihat pada Gambar 1.3 penetapan BI rate menunjukkan adanya perubahan. Puncaknya pada tahun 2018 dengan jumlah 6,00 %, diikuti pada tahun 2019 mengalami penurunan 1% menjadi 5,00%. Naik turunnya BI rate mempengaruhi investasi dan kesempatan kerja dan dampaknya pada tingkat pengangguran.

Dari fenomena di atas, selama ini belum ada penelitian terkait hubungan BI rate dengan tingkat pengangguran, maka penulis ingin meneliti **“Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Pendidikan dan BI rate terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2016-2019”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Pendidikan dan BI *rate* secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran di Inonesia tahun 2016-2019?
2. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanam Modal Asing (PMA), Pendidikan dan BI *rate* secara bersama-sama terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia tahun 2016-2019?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Pendidikan dan BI *rate* secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran di Inonesia tahun 2016-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Pendidikan dan BI *rate* secara bersama-sama terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia tahun 2016-2019.

#### 1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang permasalahan yang diteliti, yaitu PMDN, PMA, Pendidikan, *BI rate* dan Tingkat Pengangguran di Indonesia.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dijadikan bahan sekaligus rekomendasi mengenai pengaruh variabel diatas khususnya kebijakan dalam mengurangi tingkat Pengangguran.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, memberikan informasi dan masukan atau rujukan untuk peneliti selanjutnya agar hasil penelitian menjadi lebih baik lagi.

4. Kegunaan Ilmiah

Untuk mengetahui hubungan *BI rate* dengan tingkat pengangguran di Indonesia. Dikarenakan selama ini belum banyak penelitian yang mendeskripsikan hubungan *BI rate* dengan tingkat pengangguran di Indonesia.

## **1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Indonesia. lebih tepatnya mengenai semua Provinsi yang ada di Indonesia. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder yaitu publikasi laporan PMDN, PMA, Pendidikan, BI *rate* dan Tingkat Pengangguran melalui sumber terpercaya seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dalam angka dan sumber lain yang relevan dengan kajian peneliti.

### **1.5.2 Jadwal Penelitian**

Jadwal penelitian ini dibuat dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat diselesaikan sesuai dengan matriks yang direncanakan.



